

1

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 5

TAHUN 2008

DPR panggil Sofyan Djalil terkait pemecatan direktur PLN

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Komisi VII DPR akan memanggil Meneg BUMN Sofyan Djalil, Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN. (Persero) untuk diminta pertanggungjawabannya terkait pemecatan Ali Herman Ibrahim sebagai Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PLN.

Wakil Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana menyatakan pihaknya mempertanyakan langkah pemecatan Ali Herman oleh Dewan Komisaris PLN dan dinilainya penuh dengan kejangalan.

"Saya juga kaget dengan keputusan itu [pencopotan]. Besok [Selasa hari ini] kami akan bikin jadwal untuk pemanggilan Meneg BUMN, Dewan Komisaris dan Direksi PLN. Ini termasuk prioritas pertama," katanya di Jakarta, kemarin.

Sutan menegaskan dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikenal dengan istilah tanggung renteng. "Pemecatan seharusnya

tidak hanya terjadi pada Ali Herman, tetapi direksi dan komisaris seluruhnya juga diberhentikan."

Menurut catatan *Bisnis*, PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk telah dipercaya untuk mengangkut batu bara dari Kalimantan Timur ke pembangkit listrik Tanjung Jati B Jepara, Jawa Tengah. Saat ini, Arpeni menggunakan kapal MV Urmila berbobot mati 62.000 ton (DWT) dan MV Banowati (63.000 DWT) secara simultan untuk memuat batu bara di Kaltim tujuan PLTU Tanjung Jati B.

Sutan menambahkan tender pengangkut batu bara itu sudah dimintakan persetujuan pada Dewan Komisaris PLN pada 22 November 2007. Namun persetujuan itu, belum diteken oleh Dewan Komisaris hingga saat ini.

"Mestinya bila ada persetujuan selesai masalah ini. Artinya, persetujuan itu menyangkut Dewan Komisaris. Tapi kenapa mereka hanya menyalahkan Ali Herman. Seharus-

nya, Dewan Komisaris PLN juga ikut tanggung jawab atas pengadaan itu."

Komisaris Utama PLN Alhilal Hamdi enggan berko-mentaris soal tanggapan dari anggota DPR itu. Namun, dia hanya memberi jawaban Ali Herman masih memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri pada mekanisme RUPS yang digelar dalam waktu dekat ini.

Di tempat terpisah, GM Peralihan dan Pusat Pengaturan Beban Jawa-Bali lewat pesan singkat menjelaskan pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B telah bertambah menjadi sekitar 40.000 ton.

Penambahan bisa dilakukan, tuturnya, karena cuaca sudah membaik sehingga proses bongkar muatan batu bara dari kapal pengangkut bisa dilakukan.

"Minggu kemarin [06/01] cuaca bagus sehingga bisa dilakukan unloading batu bara." (09/RUDI ARIFFIANTO)

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 5

TAHUN 2008

Produksi listrik AS catat rekor tertinggi



2006 2007

NEWYORK: Amerika Serikat, pada tahun lalu, mencatat produksi tenaga listrik yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, yakni mencapai 4,1 juta gigawatt hour (GWh).

Pencapaian produksi listrik tersebut didorong oleh pertumbuhan ekonomi dan musim panas yang meningkatkan penggunaan energi.

Institute Kelistrikan Edison menyatakan produksi tenaga listrik AS pada 2007 mengalami peningkatan 2,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Peningkatan pemakaian energi listrik tertinggi dicatat oleh negara bagian Rocky Mountain yakni 6,4%. Selanjutnya diikuti oleh Pacific Northwest sekitar 5,1%.

Institute yang berbasis di Washington ini melaporkan musim panas telah mendorong peningkatan permintaan listrik untuk pemakaian alat-alat pendingin, yakni naik 4% dari tahun sebelumnya.

Pada kuartal kedua 2007, *gross domestic product* (GDP) AS meningkat 3,8% dan naik jadi 4,9% pada kuartal ketiga. Peningkatan GDP ini merupakan pertumbuhan tertinggi sejak kuartal pertama 2006. (Bloomberg/09)

Sumber: Edison Electricity Institute BISNIS/ADI PURDIANTO

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 28

TAHUN 2008

Listrik di Rote masih Padam

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) hingga kemarin siang masih memadamkan aliran listrik di daerah itu untuk menghemat pemakaian bahan bakar.

Pemadaman listrik terjadi sejak Minggu (6/1) malam setelah kapal pengangkut bahan bakar minyak (BBM) tidak bisa berlayar dari Kupang ke Rote karena cuaca buruk. Deputi Manajer Hukum dan Informasi PT PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) Buce Lioe berjanji pemadaman segera berakhir malam ini.

Menurutnya, sebuah perahu layar yang mengangkut 5.000 liter solar telah tiba di Pelabuhan Ba'a, ibu kota Kabupaten Rote Ndao. "Tadi sudah mulai dibongkar muat sehingga malam ini listrik sudah bisa menyala kembali," ujar Buce, kemarin.

Ia menambahkan, kapal motor Timau yang bertugas mengangkut bahan bakar ke Rote telah bertolak ke pulau itu kemarin pagi. Kapal tersebut membawa 5.000 liter solar. Kapal dijadwalkan sandar di Pelabuhan Ba'a kemarin petang.

Pemadaman terjadi akibat satu-satunya pembangkit listrik tenaga diesel di Pulau Rote kehabisan bahan bakar solar. (PO/N-2)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

ENERGI ALTERNATIF

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGST

SEPT

OKT

NOV

DES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 20

TAHUN 2008

Ali Herman Gugat Pemerintah

Oleh Drajad Satrio Purnomo

► JAKARTA- Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PT PLN Ali Herman Ibrahim resmi dicopot dari jabatannya dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PLN di Jakarta, Selasa (8/1). Namun, Ali tidak menerima pelengseran dirinya dan berencana menggugat pemegang saham.

Hamdan Zulfa, kuasa hukum Ali Herman, mengatakan, pihaknya menolak keputusan RUPSLB karena dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Menurut dia, kelalaian dalam menjaga pasokan batubara tidak layak dijadikan alasan pemberhentian kliennya. Sebab, pasokan batubara sebenarnya lancar, hanya saja terkendala ketiadaan kapal dan cuaca buruk.

"Kami akan mengajukan gugatan ke PTUN (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara)



■ Ali Herman Ibrahim

atas ketidakadilan pemegang saham PLN," kata Hamdan usai RUPSLB yang baru berakhir pada pukul 22.00 WIB.

Hamdan juga menilai, keputusan RUPSLB cenderung sewenang-wenang. Sebab, sebelumnya pemerintah menyatakan akan membentuk tim investigasi untuk mengetahui secara detail sebab musabab pemberhentian Ali Herman Ibrahim. Namun, tim investigasi belum bekerja, RUPSLB sudah memutuskan pemberhentian kliennya secara permanen.

Sementara itu, Deputi Meneg BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Telekomunikasi Roes Aryawijaya mengungkapkan, tiga hal yang mendasari keputusan RUPSLB itu adalah surat dari dewan komisaris, terganggunya pasokan ba-

tubara PLTU Tanjung Jati B di Jepara yang berbuntut dipadamkannya salah satu unit PLTU itu. Selain itu, pembelaan Ali Herman Ibrahim dalam RUPSLB dinilai pemegang saham kurang memuaskan.

"Kelalaian itu telah menyebabkan kerugian negara," kata dia. Roes menambahkan, potensi kerugian negara akibat tambahan BBM dari kekurangan pasokan batubara di PLTU Tanjung Jati B sekitar Rp 30-40 miliar per unit per hari.

Dia juga mengatakan, dengan dicopotnya Ali Herman Ibrahim, RUPSLB juga memutuskan pelaksana tugas (plt) Direktur Pembangkitan dan Energi Primer dijabat oleh Fachmi Mochtar yang saat ini menjabat *general ma-*

nager PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.

Dirut PLN Eddie Widiono Suwondho mengatakan, jajaran direksi menerima keputusan RUPSLB tersebut. Menurut dia, jajaran direksi telah bekerja keras untuk melaksanakan amanah dari pemegang saham dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. "Kami sudah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya," kata Eddie dengan mimik memelas.

Sementara itu, Ali Herman Ibrahim ketika dicegat wartawan tadi malam tampak sedih. Dia tidak bersedia berkomentar. "No comment ya," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, rapat komisaris PLN Jumat (4/1) menetapkan Ali Herman digusur dari jabatannya untuk sementara karena dituding menjadi penyebab kelangkaan pasokan batubara untuk sejumlah pembangkit listrik, terutama PLTU Tanjung Jati B di Jepara, Jawa Tengah. Ali Herman diberi kesempatan maksimum 30 hari setelah pencopotan sementara itu untuk memberikan klarifikasi.

Berdasarkan pantauan *Investor Daily*, RUPSLB PLN tadi malam selain dihadiri jajaran direksi—termasuk Ali Herman Ibrahim—komisaris, dan pemegang saham PLN, tampak hadir Ketua Umum Partai Bintang Bulan (PBB) Hamdan Zulfa.

Juru bicara PLN Ario Subijoko sebelumnya mengatakan, RUPSLB tersebut membahas mengenai Rencana Keuangan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PLN sekaligus agenda 'pembelaan' Ali Herman soal gangguan pasokan batubara untuk pembangkit, yang menjadi pintu masuk bagi penghentiannya sebagai direktur.

Ario menegaskan, rapat berlangsung sangat ketat. Hanya direksi, komisaris dan deputi kementerian BUMN yang mengikuti forum. "Bahkan deputi direktur tidak boleh masuk," jelasnya.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

(JAN) FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 (9) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 20

TAHUN 2008

PROGRAM LAMPU HEMAT ENERGI

Habis Hemat, Terbitlah Terang

Berhati-hatilah memilih lampu penerangan! Jika salah membeli lampu untuk keperluan rumah tangga, bisa-bisa tagihan listrik anda membengkak.

"Saya pernah mengukur lampu TL yang menggunakan *balast* kawat, konsumsi listriknya bisa mencapai 70 watt. Padahal, pada lampu tersebut tertulis spesifikasi konsumsi listrik hanya 8 watt," ujar Benny Marbun, pelaksana harian Deputi Pengembangan Bisnis, Direktorat Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT PLN.

Lantaran harganya murah, lampu jenis ini memang banyak digunakan oleh masyarakat dengan tujuan penghematan. Menghemat listrik, sebenarnya menjadi keinginan banyak pihak. Bukan hanya konsumen PLN, tapi juga seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di sektor kelistrikan.

Namun, jika tidak dilandasi pemahaman yang tepat langkah penghematan bisa saja tak membuahkan hasil. Guna memastikan penghematan listrik berjalan sesuai sasaran, PLN melakukan program Lampu Hemat Energi (LHE). Inilah upaya menghemat pemakaian atau konsumsi listrik dengan pembagian LHE sebanyak 51 juta gratis kepada sekitar 34 juta pelanggan PLN pada tahun ini.

Menurut ahli ekonomi energi PLN Syaiful B Ibrahim, sasaran program ini adalah menggantikan lampu pijar 40 watt atau lebih besar yang saat ini masih digunakan masyarakat. Penggantinya adalah LHE 8 watt dengan sinar putih dengan usia nyala 5.000 jam. Setiap rumah tangga mendapatkan tiga buah LHE secara gratis dari PLN.

"Program LHE ini berdasarkan analisa benefit *cost factor* mencapai 200%, sehingga sangat *feasible* dilaksanakan," ujarnya.

Keuntungan berupa penghematan bukan hanya dirai-

sakan konsumen, tapi juga PLN bahkan juga pemerintah. Profit dalam bentuk penghematan bersih program ini bagi PLN, lanjut Syaiful, mencapai Rp 1,9 triliun per tahun.

Menurut Syaiful, penggantian lampu pijar dengan LHE akan menghemat 2,4

dengan penghematan 811,38 juta liter BBM per tahun.

Volume BBM sebesar inilah yang bisa dihemat setiap tahun. Sementara itu nilainya mencapai Rp 2,8 triliun per tahun. Untuk pengadaan 51 juta LHE, dibutuhkan biaya sebesar Rp 920,8 miliar. Jika angka ini dikurang-

Ringkasan Program LHE

Sasaran	Pelanggan Rumah Tangga
Jumlah pelanggan RT	34.104.210
Jumlah LHE per pelanggan	3 buah
Jumlah LHE yang akan dibagi	51.156.329
Cara pembagian	Gratis, ditukar dengan lampu pijar atau lampu boros lainnya
Asumsi lampu pijar yang diganti	40 watt
Jumlah penghematan listrik	2.458.735 MWh per tahun Ekuivalen dengan 1.500 MW
Penghematan BBM	811,38 juta liter per tahun
Pendapatan PLN yang berkurang	Rp 1,27 triliun
Penghematan BBM	Rp 2,8 triliun
Biaya LHE	Rp 920,8 miliar
Net Saving Program LHE	Rp 1,9 triliun per tahun



juta MWh per tahun. Angka ini setara dengan daya listrik sebesar sekitar 1500 MW. Berdasarkan asumsi bahwa untuk menghasilkan setiap kWh dibutuhkan 0,35 liter BBM, penghematan listrik 2,4 juta MWh itu setara

kan terhadap biaya penghematan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 2,8 triliun tadi, diperoleh penghematan bersih program LHE sebesar Rp 1,9 triliun.

Selain keuntungan berupa

penghematan, program LHE juga mendatangkan klaim *clean development mechanism* (CDM). Alasannya, program menghasilkan CO2 *reduction*. Setiap 1 kWh yang dihemat dihindari 0,9 kilo CO2. Sementara itu, setiap ton CO2 yang direduksi mendapat klaim 15 •.

Guna memastikan bahwa LHE dimanfaatkan, lampu pijar dari konsumen langsung dihancurkan setelah diganti dengan LHE. Adapun jatah pembagian tiga buah LHE dengan pertimbangan kebiasaan masyarakat menyalakan lampu lebih dari enam jam pada tiga lokasi di lingkungan rumah atau kediamannya. Masing-masing adalah lampu pada teras depan, ruang tamu dan teras belakang.

Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN Sunggu Aritonang menegaskan, program LHE yang pada dasarnya merupakan penugasan pemerintah memiliki efek berganda bagi perekonomian Indonesia. Tak ha-

nya keuntungan ekonomi, program ini bisa membuka lapangan kerja.

Sejatinya, program ini menjadi incaran kalangan produsen LHE. Maklum, kebutuhan sebesar 100 juta merupakan pasar yang menggiurkan. Persoalannya, apakah produsen di dalam negeri bisa memenuhi permintaan ini? Bukan hanya dari sisi kuantitas namun sekaligus juga kualitas?

Program LHE tampaknya sederhana. Mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi bersinar putih. Meski menggunakan energi listrik jauh lebih rendah, cahaya terang yang dihasilkan LHE tidaklah kalah dengan lampu pijar. Jika ditotal akan menjadi angka penghematan yang tidak kecil.

Di tengah harga minyak yang semakin meninggi serta biaya produksi listrik semakin mahal, upaya penghematan tak bisa ditunda lagi. *Toh*, cahaya terang yang dihasilkan tidak berkurang. (dr)

5

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGST

SEPT

OKT

NOV

DES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 10

TAHUN 2008

PLN Maklumi Tunggakan Pembayaran Listrik

■ **JAKARTA** - Tunggakan pembayaran listrik yang kerap dilakukan pemerintah dimaklumi PT PLN (persero). Deputy Manager Komunikasi dan Bina Lingkungan PT PLN (Persero) Azwar Lubis, Senin (7/1) malam mengatakan, PLN maklum karena selain faktor pencairan dana pemerintah yang memakan waktu dan melalui proses ke DPRD, juga karena alasan kerja sama yang dijalin PLN dengan pemerintah.

Dia menyatakan semua tunggakan listrik pemerintah dapat diganti sementara dengan memanfaatkan pajak Penerangan Jalan Umum (PJU). "Ada kerja sama antara pemerintah dengan PLN. Pajak PJU yang selama ini dikutip ke pelanggan umum dapat dikompensasikan untuk membayar rekening listrik pemerintah yang belum dibayar," katanya.

Kutipan pajak PJU yang ditagih 3 persen dari setiap pelanggan umum dinilai mencukupi untuk menutupi tunggakan pemerintah yang belum dibayar. (rma)

7

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 17

TAHUN 2008

Warga GCA Gelar Doa Bersama

BANDUNG, (PR).-

Warga Kompleks Griya Cempaka Arjuna (GCA) Kec. Gedage Kota Bandung tetap menolak keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di dekat permukiman mereka dengan melakukan doa bersama. Menurut Asep Romli, seorang warga yang pernah ikut Wali Kota Bandung Dada Rosada melihat PLTSA di Singapura, ada beberapa hal penting yang tidak diterapkan dalam PLTSA di Bandung.

"Yang pertama jarak dan yang kedua lokasi," kata Asep di sela-sela doa bersama warga GCA, Selasa (8/1).

Lokasi PLTSA di Singapura, kata dia, jauh dari permukiman warga. "Kira-kira 4-5 kilometer dari permukiman terdekat. Itu pun berada di area khusus industri dan di tepi pantai, bukan di tengah-tengah permukiman seperti di sini (Bandung-red.)," ujarnya.

Pemilihan lokasi di pinggir pantai itu ada maksudnya. "Dari pemaparan orang-orang di Singapura, PLTSA sengaja didirikan di pinggir pantai untuk menghindari polusi ke warga. Asap dan debunya kan langsung terbawa angin ke pantai dan yang jatuh ke tanah hanya sedikit," ucap Asep.

Demikian pula abu sisa pembakaran dipakai untuk reklamasi pantai. Selain itu, cerobong asap ada dua dengan ketinggian masing-masing 150 meter. "Kalau di Bandung kan rencananya hanya 50 meter. Jadi, asap dan debu mengenai warga sangat mungkin terjadi," ucap Asep lagi.

Kaum ibu

Berdasarkan hal itu, Asep tetap menolak dibangunnya PLTSA di dekat permukiman. "Kalau jauh dari permukiman seperti di Singapura, ya saya setuju saja. Tapi tidak kalau seperti sekarang," katanya.

Menurut Asep, aksi demonstrasi penolakan PLTSA yang dilakukan warga sebenarnya tidak perlu terjadi jika wakil rakyat di DPRD Kota Bandung melakukan tugasnya dengan baik. "Sayangnya, wakil-wakil rakyat kita tidak menyampaikan aspirasi warganya. Saya tidak tahu kenapa," ucapnya.

Doa bersama tersebut dihadiri ratusan warga yang kebanyakan kaum ibu. Selain warga Kota Bandung, aksi doa bersama tersebut juga dihadiri puluhan perwakilan warga dari tiga kecamatan di Kab. Bandung. Mereka dari Kec. Cileunyi, Rancaekek, dan Bojongsoang.

Rahman Esha asal Desa Cibiru Hilir, menegaskan penolakannya terhadap PLTSA. "Di desa saya, sebanyak 203 warga dari RW 5 sampai 15, menolak PLTSA. Soalnya, Pemkot Bandung tidak pernah sekalipun menjelaskan kepada warga Cibiru Hilir tentang PLTSA. Padahal rumah kami hanya berjarak 300 meter dari lokasi calon PLTSA," tuturnya.

Esha menambahkan, Pemkot Bandung tidak peduli terhadap masyarakat yang terkena dampak PLTSA, seperti tercantum dalam SK Bapedal No. 8 Tahun 2000. "Buktinya, pemkot tidak menggubris Surat No. 658.1/96/Pem tanggal 8 Agustus 2007 dari Pemerintah Desa Cibiru Hilir. Surat itu berisi permintaan warga kepada Pemkot Bandung untuk memberi penjelasan soal PLTSA," katanya. (A-128)***



M. GELORA SAPTA/PR

RATUSAN warga melakukan doa bersama untuk ketenangan lingkungannya, Selasa (8/1) di perumahan Griya Cempaka Arum, Kelurahan Mekarmulya Kec. Rancasari Kota Bandung (foto kiri). Doa bersama memohon perlindungan akan rencana pembangunan PLTSA dilaksanakan di pelataran ruko perumahan tersebut. Pada saat bersamaan, di pintu masuk kompleks perumahan, Wali Kota Bandung Dada Rosada mengadakan acara penghijauan (foto atas).*

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 15

TAHUN 2008

**Aperlindo Sesalkan Keputusan
PLN**

■ **JAKARTA**-Asosiasi Industri Perlampuan Indonesia (Aperlindo) menyesalkan keputusan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang akan melakukan tender pengadaan lampu hemat energi (LHE) secara terbuka. Pada komitmen awalnya, PLN padahal akan melempar proyek itu dengan tender yang dikhususkan untuk kalangan produsen lokal saja.

Hal itu sejalan dengan rekomendasi dari Menteri Perindustrian Fahmi Idris yang meminta agar PLN tidak melakukan impor karena kapasitas industri LHE dalam negeri mampu memenuhi persyaratan yang diminta PLN.

(rid)

9

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 13

TAHUN 2008

Dinilai Untungkan PLN Rp 1,9 Triliun Sudah 11 Perusahaan Ikut Tender Lampu Hemat

Jakarta, Probisnis RM.

Di tengah kontroversi penggunaan lampu hemat energi (LHE), Perusahaan Listrik Negara (PLN) tetap menjalankan program penghematan energi dengan cara memberikan 51 juta LHE gratis kepada sekitar 34 juta pelanggan. Menurut Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan PLN, Sunggu Anwar Aritonang, program LHE pada dasarnya memiliki multiplier effect bagi perekonomian. Tak hanya keuntungan ekonomi, program ini bisa membuka lapangan kerja.

"Kebutuhan 51 juta lampu hemat energi merupakan pasar yang besar. Ini akan ikut mendorong pengembangan industri lampu hemat energi di tanah air, apalagi, 51 juta LHE itu baru separuh atau 50 persen kebutuhan. Sebab, sebenarnya kebutuhan program ini mencapai sekitar 100 juta LHE," ujarnya seraya mengakui program ini jadi incaran kalangan produsen LHE. Sebab, kebutuhan 100 juta LHE merupakan pasar yang menggiurkan.

Melalui jasa PT Sucofindo, sudah 11 perusahaan yang ikut verifikasi pengadaan program LHE. Langkah ini sebagai bagian dari proses tender atau lelang 51 juta buah LHE yang dananya sudah dianggarkan PLN.

Melihat azas manfaat yang diha-

silkan; menurut Sunggu, pasar atau kebutuhan LHE masih akan terus berkembang.

Pelaksana Harian Deputi Pengembangan Bisnis, Direktorat Niaga dan Pelayanan Pelanggan, PLN, Benny Marbun, menambahkan sasaran program LHE itu menggantikan lampu pijar 40 watt atau lebih besar yang saat ini masih digunakan masyarakat. Penggantian adalah LHE 8 watt dengan sinar putih dengan usia nyala 5.000 jam.

Namun dia mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati memilih lampu. Tagihan listrik bisa membengkak jika salah membeli. "Saya pernah mengukur lampu TL yang menggunakan balast kawat, konsumsi listriknya bisa mencapai 70 watt! Padahal di lampu tersebut tertulis delapan watt," ujarnya.

Ahli ekonomi energi PLN Syaiful B Ibrahim, mengatakan keuntungan penghematan bersih program PLN ini mencapai Rp 1,9 triliun per tahun. ● MAF



KRISIS BATUBARA. Meneg BUMN Sofyan Djallil saat berkunjung ke PLTU Suralaya, Cilegon, Banten. Dalam kunjungan itu, Sofyan Djallil ingin mengetahui operasi pembangkit, termasuk soal ketersediaan batubara. Di pembangkit itu diketahui memiliki stok batubara sebesar 537 ribu ton di coal yard. Stok ini cukup untuk pemakaian 17 hari. PLTU Suralaya membutuhkan batubara sekitar 13 juta ton setiap tahun.

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 8

TAHUN 2008

Ali Herman resmi dipecat

Oleh RUDI ARIFFIANTO
Bisnis Indonesia

JAKARTA: PT PLN Persero akhirnya memutuskan memberhentikan secara permanen Ali Herman Ibrahim sebagai direktur pembangkitan dan energi primer, dan mengangkat GM PLN Disjaya Fahmi A. Mochtar sebagai pelaksana tugas.

Pemegang saham masih membuka kemungkinan dilakukannya pemberian sanksi serupa kepada general manager dan staf, direksi, dan komisaris PLN yang turut menyebabkan seretnya pasokan batu bara

untuk PLTU Tanjung Jati B 2 X 660 MW.

Deputi Bidang Pertambangan dan Industri Strategis Kementerian BUMN Roes Aryawidjaja mengatakan keputusan pemberhentian permanen itu didasarkan pada pertimbangan meliputi surat dewan komisaris PLN tentang pemberhentian sementara yang bersangkutan, kelangkaan pasokan batubara, dan substansi pembelaan dari Ali Herman Ibrahim.

"Ini bukan soal lalai tapi merugikan dan membuat ada po-

tensi kenaikan penggunaan BBM yang bisa menimbulkan biaya tambahan sekitar Rp30-40 miliar per unit per hari," katanya se usai RUPSLB di Jakarta, tadi malam.

Kuasa Hukum Ali Herman, Hamdan Zoelva menandatangani langkah hukum dengan mengadakan keputusan RUPSLB ke PTUN. "Kami juga mengajukannya ke presiden dan parlemen."

Dia menilai keputusan itu tidak berdasar dan sewenang-wenang. (LUZ)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 20

TAHUN 2008

Pergantian Direksi PLN Cuma Urusan Manajemen

Meneg BUMN: Dicipot Semua Juga Nggak Apa-apa

Menteri Negara BUMN, Sofyan Djaili menyatakan, terbuka kemungkinan direksi lain PT PLN mengalami nasib serupa dengan Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PLN Ali Herman Ibrahim yang dipecat akibat kelalaiannya.

HAL tersebut dikatakan Sofyan mungkin saja terjadi bilamana forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN yang akan dilakukan beberapa pekan lagi terbukti ada direksi yang juga bersalah.

"Kalau ada yang bersalah selain Ali Herman, yang lain juga bakal diambil tindakan. Jadi ber-

potensi bertambah. Diganti semua juga tak apa-apa," tegas Sofyan usai menghadiri Rapat Kerja Terbatas di Departemen PU, kemarin.

Hal ini dikatakannya menanggapi pertanyaan dari berbagai kalangan, khususnya DPR yang menyatakan mengapa tidak semua direksi PLN saja yang dicipot dari jabatannya.

Menurut Sofyan, pencopotan tersebut adalah hanya masalah manajemen. "Tak ada urusan, itu kan cuma urusan manajemen," kata Sofyan.

Bekas Menkominfo ini menegaskan, dalam RUPS PLN, nantinya akan terungkap siapa saja yang bersalah dan harus bertanggungjawab. Namun, di forum itu ada media pembelaan diri. "Ini supaya *fair* saja," ujarnya.

Karena itu, lanjut Sofyan, pihaknya meminta dilakukan inves-



■ Sofyan Djaili

tigasi agar jelas siapa saja yang bersalah atas kasus tersebut. "Kita ingin ciptakan akuntabilitas

di BUMN. Jangan orang yang berbuat merugikan negara dalam jumlah sekian banyak, kemudian mereka bisa *go free*. Yang bersalah harus diambil tindakan sesuai peraturan perusahaan," tegasnya.

Dalam hal ini, yang bertindak melakukan investigasi dan pengawasan adalah Satuan Pengendalian Internal (SPI) BUMN dan Komite Audit. RUPS nantinya yang akan memberikan sanksi.

Ditanya soal pergantian direksi yang bakal terjadi di beberapa BUMN seperti BNI, Sofyan menegaskan apa yang dilakukan pihaknya adalah demi kepentingan terbaik BUMN.

Sofyan pun enggan menanggapi pertanyaan wartawan soal siapa yang bakal disodorkan pemerintah untuk perubahan direksi di Bank BNI. "Nggak begitu dong, nanti lihat di RUPS-nya saja," kilahnya.

Sementara itu, PT PLN, membenarkan akan menggelar rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan dan luar biasa. Ali Herman Ibrahim juga ikut menjelaskan pertanggungjawabannya.

"Agendanya membahas RKAP dan mendengar penjelasan direktur yang diberhentikan," kata Kepala Divisi Humas PT PLN, Aryo Subijoko di gedung PLN Disjaya, kemarin.

Aryo juga menjelaskan, rapat akan berlangsung sangat ketat. Hanya direksi, komisaris dan deputi kementerian BUMN yang mengikuti forum. "Bahkan deputi direktur tidak boleh masuk," jelasnya.

Seperti diketahui, Ali Herman Ibrahim diberhentikan sementara dari jabatannya akibat dinilai gagal mengelola persediaan batu bara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B di Jepara, Jawa Tengah. ● IU

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 19

TAHUN 2008

PLN Diminta Investigasi

JAKARTA (SINDO) – Meneg BUMN Sofyan Djalil meminta investigasi soal kekurangan pasokan pada PLTU Cilacap dan Tanjung Jati B dilakukan menyeluruh.

Jika hasil investigasi menemukan kesalahan dilakukan direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN persero) lainnya, Meneg BUMN juga akan memberhentikan direktur terkait. "Kalau perlu semuanya kita berhentikan tidak apa-apa. Jadi, kalau yang bersalah bukan Ali Herman, yang lain akan kami beri tindakan," kata dia di Jakarta kemarin.

Sebelumnya, Dewan Komisaris memberhentikan sementara Direktur pembangkit dan Energi Primer PLN

Ali Herman Ibrahim. Ali dinilai bertanggung jawab atas terganggunya operasi PLTU Cilacap dan Tanjung Jati B akibat kekurangan pasokan batu bara. Selanjutnya, dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) PLN yang berlangsung kemarin, Ali diberikan kesempatan menjelaskan dan membeber diri atas tuduhan tersebut.

Sementara itu, Meneg BUMN meminta PLN secara internal melakukan investigasi mengenai masalah kurangnya pasokan batu bara

untuk PLTU Tanjung Jati B dan PLTU Cilacap. Investigasi itu menurut dia harus dilakukan untuk menciptakan akuntabilitas dalam perusahaan. Dia meminta investigasi dilakukan oleh kalangan internal dan diawasi komite audit. Sofyan menegaskan, orang yang berbuat salah dan merugikan negara dalam jumlah besar tidak bisa bebas begitu saja.

"Kalau ada orang lain bersalah, harus diambil tindakan yang sesuai peraturan perusahaan," tandasnya.

Sebelumnya, Komisaris Utama PLN Al Hilal Hamdi mengungkapkan bahwa diberhengkannya Ali Herman murni karena kesalahan keterlambatan pasokan batu bara di PLTU Tanjung Jati B

dan Cilacap. "Karena masalah ini kita dirugikan Rp32 miliar per hari," cetusnya. Mengingat setiap akhir tahun selalu terjadi cuaca buruk, seharusnya keterlambatan pasokan sudah dapat diantisipasi dengan menyimpan stok sebelum akhir tahun. Dia menegaskan, masalah biaya dan infrastruktur penyimpanan tidak bias dijadikan alasan karena faktor tersebut tidak bermasalah.

Terkait pernyataan Komisi VII DPR yang mengatakan akan memanggil Menteri BUMN dan manajemen PLN, Sofyan mengatakan keputusan memberhentikan Ali Herman itu tidak ada hubungannya dengan DPR. Dia menegaskan hal itu adalah murni urusan manajemen. Namun,

dia mempersilakan DPR untuk meminta pertanggungjawaban dalam masalah ini.

"Kalau meminta pertanggungjawaban silakan saja, tapi tidak ada urusan dengan masalah ini. Ini urusan manajemen," tandasnya.

Pada RUPSLB PLN kemarin, Kepala Humas PLN Ario Subioko mengungkapkan agenda yang digelar adalah RKAP PLN dan pertanggungjawaban Ali Herman. Sementara Al Hilal Hamdi yang dimintai konfirmasi soal pernyataan Meneg BUMN mengungkapkan belum mengetahui hal itu. Al Hilal juga enggan berkomentar soal kemungkinan diberhentikannya direksi lain terkait masalah tersebut.

(nunung ahniar/ferial thalib)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

- KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

- MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

- GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : B2

TAHUN 2008

Pencopotan Direksi PLN Bakal Bertambah

JAKARTA — Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Sofyan Djalil mengisyaratkan pemberhentian direksi PT PLN (Persero) bakal bertambah. Sebelumnya, Direktur Pembangkitan dan Energi Primer PLN Ali Herman Ibrahim dicopot dari jabatan untuk sementara waktu sejak Jumat lalu. "Ya, ada (direksi lainnya). Karena di forum pembelaan diri (Ali Herman) akan ketahuan siapa dan/atau siapa saja yang bersalah," ujarnya kemarin.

Dia menjelaskan, siapa pun yang terbukti bersalah, melalui forum pembelaan diri tersebut, pasti akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan. "Kalau perlu, semuanya (direksi), semuanya kami berhentikan juga tidak apa-apa," katanya.

Sebelumnya, Dewan Komisaris PLN telah memberhentikan sementara Ali Herman sebagai direktur pembangkitan. Pemberhentian tersebut terkait dengan tidak beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B karena kehabisan batu bara. Selain Tanjung Jati B, pembangkit lainnya, PLTU Cilacap, mengalami hal yang sama.

Menurut Sofyan, dia telah memerintahkan pelaksanaan investigasi atas kasus tersebut. Tujuannya untuk menciptakan akuntabilitas di badan usaha milik negara. "Jangan sampai orang yang telah merugikan negara dalam jumlah yang sekian banyak kemudian bisa *go free* (bebas)," katanya. Investigasi tersebut akan dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Intern PLN, yang diawasi langsung oleh Komite Audit Kementerian Negara BUMN.

Sofyan mempersilakan Dewan Perwakilan Rakyat meminta pertanggungjawaban dari dirinya. "Silakan saja. Tapi tidak ada urusannya dengan masalah ini, karena ini urusan manajemen (PLN)," katanya.

Di tempat terpisah, Ali Herman memberikan pertanggungjawaban pada rapat umum pemegang saham kemarin. Dalam rapat tersebut hadir dewan komisaris dan semua direksi PLN. Adapun deputi direktur tidak ikut dalam rapat umum pemegang saham.

Menurut juru bicara PLN, Ario Subijoko, Ali Herman menyampaikan lebih awal pertanggungjawabannya sebagai direktur. Sesuai dengan ketentuan, kata dia, sejak diberhentikan sebagai direktur diberi kesempatan 30 hari untuk melakukan pembelaan. Rapat umum tersebut membahas pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan 2008.

Wakil Ketua Komisi Energi DPR Sonny Keraf menyatakan dukungannya terhadap adanya perombakan jajaran direksi PLN. Perombakan dilakukan untuk melakukan terobosan kinerja, peningkatan efisiensi bahan bakar, dan menjaga pasokan listrik aman. "Banyak provinsi mengeluh, terus-menerus ada pemadaman yang menghambat pertumbuhan ekonomi," ujarnya kepada *Tempo*. • WAHYUDIN FAHMI | MIEKE INDRIETTA

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2008

SURAT PEMBACA

**Pemda DKI dan PLN
Seharusnya Satu Suara**

Kami terkejut sekali ketika membaca berita soal permukiman di bantaran kali yang selalu mengundang masalah banjir di saat musim hujan tiba, terutama adanya fasilitas aliran listrik dari PLN. Pasalnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto telah meminta pihak PLN agar mencabut semua fasilitas listrik warga di bantaran kali yang selama ini sering terkena musibah banjir.

Namun pihak PLN menjawab, bahwa pemutushubungan tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh PLN, karena warga di bantaran kali selama ini tergolong sebagai pelanggan yang tidak bermasalah, artinya kasus pencurian listrik di wilayah bantaran kali relatif sangat kecil sekali, sehingga tidak ada alasan bagi PLN untuk mencabut/memutuskan aliran listrik tanpa kesalahan yang jelas. Kasus ini tentu sangat menarik perhatian publik, karena di satu sisi Pemda DKI berencana menertibkan lokasi bantaran kali supaya bersih dari permukiman yang tidak layak. Tapi di sisi lain, PLN tidak bisa sewenang-wenang memutuskan aliran listrik tanpa ada pelanggaran atau tindak pidana pencurian.

Hal ini tentu sebagai bahan kajian kalangan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) DKI agar serius memberikan jalan keluar terbaik dalam penyelesaian permukiman 'liar' di bantaran kali, yang sering menimbulkan masalah banjir yang tentunya merepotkan banyak pihak dalam hal sisi kemanusiaannya.

Sylvia Simanjuntak
Kampung Melayu Kecil, Jakarta

15

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA**

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 10

TAHUN 2008

Cadangan Batu Bara PLTU Meningkat

[JAKARTA] Pasokan batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mulai membaik, dengan berhasil datangnya kapal yang mengangkut 60.000 ton batu bara. Dan dua kapal lagi sedang menunggu untuk mengangkut. Sehingga cadangan batu bara telah meningkat 40.000 ton, atau kurang lebih setara dengan Rp 6 triliun.

Demikian dijelaskan direktur utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Eddie Widiono, Senin (7/1) di Jakarta. "Khusus untuk PLTU Cilacap, pasokan batu bara baru akan tiba hari Rabu (9/1). Ini karena Cilacap tidak mempunyai pelabuhan untuk kapal, hanya menggunakan pelabuhan tongkang. Memang pelabuhan ini didesain untuk menampung pasokan batubara dari tongkang. Dan tongkang yang berangkat ke Cilacap ini relatif lebih lambat dari kapal," kata Eddie.

Sedangkan untuk PLTU Tanjung Jati B, pelabuhan khusus didesain untuk menerima kapal dan pelabuhan PLTU Suralaya dapat menampung baik kapal maupun tongkang. Kendala-kendala yang dihadapi PLN sejauh ini adalah dalam hal harga batubara dan transportasi pengangkut batubara. "Saat ini PLN sedang menyelesaikan beberapa negosiasi dengan para pemasok batubara. Karena para pemasok ini menghendaki kenaikan harga yang cukup tinggi di awal tahun 2008, sekitar 30 persen. Ini menjadi masalah yang cukup rumit," lanjutnya.

Menurut Eddie, semua ini sangat bergantung pada permintaan dan persediaan. Karena memang kebanyakan produksi batubara Indonesia adalah untuk ekspor, dan akan bergerak seiring dengan harga di dunia, yang dipengaruhi oleh harga BBM. Saat ini pemerintah sudah mempunyai informasi yang cukup tentang pasokan batu bara yang dibutuhkan PLN. Dan PLN yakin tanpa perlu diajukan permohonan, pemerintah akan mengambil langkah-langkah untuk mengamankan pasokan batu bara PLN.

Tetapi jika terjadi kelangkaan, PLN terpaksa harus mengoperasikan BBM (Bahan Bakar Minyak) sambil terus menyelesaikan negosiasi dengan pemasok batu bara. Dan PLN harus menghitung selisih harga yang telah dinegosiasikan antara pemakaian pembangkit bahan batubara dan pembangkit BBM. PLN menjanjikan bahwa tidak ada strategi pemadaman untuk menghemat BBM. "Karena tugas utama PLN adalah untuk menyediakan listrik, karena itu pada saat stok batu bara berkurang, pembangkit BBM harus dijalankan untuk memenuhi kebutuhan," tegasnya. [MRS/M-6]

16

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS
 ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI -
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : II

TAHUN 2008

MENGENAL LEBIH DEKAT PLTU SURALAYA
**Tulang Punggung Listrik
Se-Jawa dan Bali**

Cuaca buruk yang berbuah gelombang laut besar, sudah banyak memakan korban. Bukan hanya korban nyawa, tapi juga terancamnya listrik di Jawa dan Bali. Bahkan gara-gara cuaca buruk, salah satu direksi PLN dicopot dari jabatannya, walau masih diberi kesempatan untuk membela diri dalam beberapa pekan ke depan. Lho kok bisa?

Ternyata cuaca buruk berbuntut terganggunya pasokan batubara ke beberapa pembangkit listrik yang mengandalkan batubara sebagai bahan bakarnya. Nah, lantaran cuaca buruk, jalur transportasi laut pun terganggu. Imbasnya, pasokan batubara dari Sumatera dan Kalimantan pun jadi kacau. Alhasil, direksi PLN yang dianggap paling bertanggung jawab pada urusan itu pun dicopot lantaran tidak segera menyiapkan langkah antisipasi mengatasi kendala pasokan batubara.

Salah satu sumber listrik utama yang memasok Jawa dan Bali adalah PLTU Suralaya. Begitu pentingnya keberadaan PLTU Suralaya terlihat dari kunjungan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil yang khawatir pasokan listrik di Jawa Bali terganggu hanya karena urusan batubara. Alhasil, Meneg BUMN Sofyan Djalil pun menyempatkan diri datang ke PLTU Suralaya yang letaknya cukup jauh di Cilegon.

Meski perannya sangat strategis, boleh jadi banyak kalangan yang belum tahu peran dan keberadaan PLTU Suralaya. PLTU ini dibangun tahun 1982 dan mulai beroperasi tahun 1984, sebagai PLTU Pertama di Indonesia dengan memakai bahan bakar batubara bersamaan dengan didirikannya PT Bukit Asam. Pemerintah mengambil keputusan ini setelah terjadi krisis politik Timur Tengah sekitar tahun 1978 yang mengakibatkan terjadi embargo produsen minyak sehingga harga minyak dunia melonjak tinggi.

PLTU Suralaya mengoperasikan 7 pembangkit dengan kapasitas 4 x 400 MW dan 3 x 6000 MW dengan jumlah total 3400 MW serta memberi kontribusi sekitar 25 persen kelistrikan Jawa Bali. Saat ini sedang berlangsung pembangunan PLTV Suralaya unit 8 dengan kapasitas 630 MW sebagai salah satu program pemerintah untuk percepatan 10.000 MW. Proyek yang dilaksanakan oleh CNTIC (China National Technology Import-Export Corporation) dan PT. Rekayasa Industri ini akan beroperasi sekitar tanggal 15 Desember 2009.

Dalam satu tahun PLTU Suralaya membutuhkan Batubara sekitar 13 juta Ton dan dipasok dari Sumatra dan Kalimantan melalui jalur Laut. Pada hari ini stok batubara di Coal Yard PLTU Suralaya sekitar 537.000 Ton atau cukup untuk pemakaian 17 hari. Dengan adanya cuaca yang buruk, gelombang laut yang tinggi, tongkang dari Kalimantan belum bisa melanjutkan perjalanan dan saat ini sekitar 10 tongkang bersembunyi di perairan sekitar Pulau Bawean. Kapal kapal besar masih bisa beroperasi dan melakukan pembongkaran di Dermaga PLTU Suralaya.

Kinerja PLTU Suralaya selama 5 tahun terakhir telah melampaui standar internasional NERC (North American Electric Council) yaitu EAF 87,83 persen dari standar 82,97 persen bahkan di 2006 EAF mencapai 90,01 persen. Biaya pokok produksi rendah yaitu sekitar Rp 260/KWH pada tahun 2007. Dibanding dengan pembangkit yang memakai BBM, biaya pokok produksi ini PLTU Suralaya hanya seperenamnya. (Kamsari)

17

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

- KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA
 MIGAS DAN PANAS BUMI GEOLOGI
 ENERGI ALTERNATIF UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 11

TAHUN 2008

Program Lampu Hemat Energi Rumah Terang, Kantong Tetap Tenang

Hati-hati memilih lampu pen-
erangan. Tagihan listrik anda
bisa membengkak jika salah
membeli lampu untuk keperluan
rumah tangga. Setidaknya begitu-
lah peringatan Benny Marbun,
Pelaksana Harian Deputi
Pengembangan Bisnis, Direktorat
Niaga dan Pelayanan Pelanggan PT
PLN (Persero).

"Saya pernah mengukur lampu
TL yang menggunakan balast
kawat, konsumsi listriknya bisa
mencapai 70 watt!," ujar Benny
Marbun. Padahal pada lampu terse-
but tertulis spesifikasi konsumsi
listrik hanya 8 watt. Karena har-
ganya murah, lampu jenis ini
banyak digunakan masyarakat
demi penghematan.

Menghemat listrik, sebenarnya
menjadi keinginan banyak pihak.
Bukan hanya konsumen, namun
juga PLN. Hanya saja jika tidak
dilandasi pemahaman yang tepat
langkah penghematan bisa saja tak
membuahkan hasil. Guna memastikan
penghematan listrik berjalan sesuai
sasaran, PLN melakukan program
Lampu Hemat Energi (LHE). Inilah
upaya menghemat pemakaian atau
konsumsi listrik dengan pema-
ngian LHE sebanyak 51 juta gratis
kepada sekitar 34 juta pelanggan
PLN pada tahun 2008 ini.

Sasaran program ini adalah
menggantikan lampu pijar 40 watt
atau lebih besar yang saat ini masih
digunakan masyarakat.
Penggantinya adalah LHE 8 watt

dengan sinar putih dengan usia
nyala 5000 jam. Setiap rumah tan-
ga mendapatkan tiga buah LHE
secara gratis dari PLN. "Program
LHE ini berdasarkan analisa *benefit
cost factor* mencapai 200 persen.
Sehingga sangat *feasible* dilak-
sanakan," ujar Syaiful B Ibrahim,
Ahli Ekonomi Energi PLN.

Keuntungan penghematan bukan
hanya dirasakan konsumen, namun
juga PLN bahkan juga pemerintah.

Keuntungan dalam bentuk
penghematan program ini bagi
PLN, mencapai Rp 1,9 triliun per
tahun. Rinciannya, penggantian
lampu pijar dengan LHE akan
menghemat 2,4 juta MWh per
tahun. Angka ini setara dengan
daya listrik sebesar sekitar 1500
MW. Berdasarkan asumsi bahwa
untuk menghasilkan setiap kWh
dibutuhkan 0,35 liter BBM, maka
penghematan listrik 2,4 juta MWh
itu setara dengan penghematan
811,38 juta liter BBM per tahun.
Volume BBM sebesar inilah yang
bisa dihemat setiap tahun. Sedang
nilainya sebesar Rp 2,8 triliun per
tahun.

Untuk pengadaan 51 juta LHE,
dibutuhkan biaya sebesar Rp 920,8
miliar. Jika angka ini dikurangi
biaya penghematan pemakaian
BBM sebesar Rp 2,8 triliun maka
diperoleh penghematan program
LHE sebesar Rp 1,9 triliun. "Jelas ini
penghematan besar," ujarnya.

Selain keuntungan penghe-
matan, program LHE juga men-

datangkan klaim *Clean
Development Mechanism (CDM)*.
"Sebab, pada program ini akan
dihasilkan CO2 reduction," ujar
Syaiful. Setiap 1 kWh yang dihemat
dihindari 0,9 kilo CO2. Sedang
setiap ton CO2 yang direduksi
mendapat klaim 15 €.

Klaim CDM sekaligus juga
menjadi cara efektif untuk
menjalankan program ini
sesuai sasaran. Sebab, pada
proses klaim CDM, senantiasa
dilakukan *asesment* maupun
pemantauan secara ketat. Selain itu
monitoring program ini diharapkan
juga melibatkan media masa serta
masyarakat luas. "Untuk memas-
tikan pelanggan menerima LHE
gratis, maka kemasaannya akan dit-
ulis gratis," papar Syaiful.

Baik Syaiful maupun Benny
mengungkapkan sasaran atau tar-
get program LHE adalah konsumen
rumah tangga golongan ekonomi
lemah. Terutama di pedesaan serta
daerah yang selama ini pasokan
listriknya dalam kondisi krisis.

Program LHE yang pada
dasarnya merupakan penugasan
pemerintah ini, menurut Direktur
Niaga dan Pelayanan Pelanggan
PLN, Sunggu Anwar Aritionang,
memiliki efek berantai bagi
perekonomian Indonesia. Tak
hanya keuntungan ekonomi, pro-
gram ini bisa membuka lapangan
kerja. "Kebutuhan 51 juta lampu
hemat energi merupakan pasar
yang besar. Ini akan ikut men-

Sunggu

dorong pengembangan industri lampu hemat energi di tanah air," ujar Sunggu Anwar Aritonang. Apalagi, 51 juta LHE itu baru 50 persen kebutuhan. Sebab, sebenarnya kebutuhan program ini mencapai sekitar 100 juta LHE.

Mestinya program ini juga menjadi incaran kalangan produsen LHE. Sebab, kebutuhan sebesar 100 juta merupakan pasar yang menggiurkan. Masalahnya, apakah produsen di dalam negeri bisa memenuhi permintaan ini? Bukan hanya dari sisi kuantitas namun sekaligus juga kualitas?

"Kapasitas industri lampu hemat energi saat ini sebesar 90 juta per tahun," ujar Abdul Wahid, Direktur Industri Elektronika, Departemen Perindustrian. Mengenai standarisasi, praktis tinggal menunggu stempel dari Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Melalui jasa PT Sucofindo, saat ini sudah ada 11 perusahaan yang telah mengikuti verifikasi pen-

gadaan program LHE. Langkah ini sebagai bagian dari proses tender atau lelang 51 juta buah LHE yang saat ini kebutuhan dananya sudah dianggarkan PLN.

Melihat azas manfaat yang dihasilkan, menurut Sunggu Anwar Aritonang, pasar atau kebutuhan LHE masih akan terus berkembang. "Jika konsumen merasakan manfaat penghematan, maka kebutuhan atau pasar LHE akan terus bertambah," ujar Sunggu Anwar Aritonang. Meski pembagian gratis hanya sekali saja dilakukan.

Program LHE tampak sederhana. Mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi bersinar putih. Meski menggunakan energi listrik jauh lebih rendah, namun cahaya terang yang dihasilkan LHE tidaklah kalah dengan lampu pijar. Ditengah biaya produksi listrik yang makin mahal, upaya penghematan tak bisa ditunda lagi. Toh, cahaya terang sama. Hemat kantong lagi. ●